

IKATAN KEKERABATAN DAN POLITIK KERAJAAN-KERAJAAN DI PERSEKUTUAN LIMAE AJATAPPARENG

Muh. Ilham Majid Dohé¹ Jusmiati²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhilhammajid19@gmail.com¹, jusmiati569@gmail.com²

Abstract

This article discusses kinship ties and politics of kingdoms in the Limae Ajatappareng Alliance. The aim of this research is to answer the researchers' questions, namely; (1) what is the background to the formation of the Limae Ajatappareng Fellowship, (2) what is the form of lineage and genealogy in the Limae Ajatappareng Fellowship and (3) what are the political conditions in establishing kinship relations in the Limae Ajatappareng Fellowship. This research is a descriptive-historical analysis of library research. The research approaches used are history (historical), sociological and anthropological approaches, as well as economic and political approaches. The findings of this research show that the background to the formation of the Limae Ajatappareng Guild is that the demand for goods from outside South Sulawesi seems to have increased in the 16th century AD. Limae Ajatappareng basically consists of kingdoms that are very large or have genealogical and kinship relationships. It is not surprising that the Limae Ajatappareng alliance was formed quickly and without facing many major challenges. The Limae Ajatappareng Guild used intermarriage politics as a defense mechanism to maintain its status as a trading center, especially against challenges from powerful kingdoms.

Keywords: Kinship; Persekutuan Limae Ajatappareng; Politics

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ikatan kekerabatan dan politik kerajaan- kerajaan di Persekutuan Limae Ajatappareng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, yaitu; (1) bagaimana latar belakang terbentuknya persekutuan Limae Ajatappareng, (2) Bagaimana bentuk garis keturunan dan geneologi di persekutuan Limae Ajatappareng dan (3) bagaimana kondisi politik dalam menjalin hubungan kekerabatan di persekutuan Limae Ajatappareng. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) historis deskriptif-analitis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Sejarah (historis), pendekatan sosiologi dan antropologi, serta pendekatan ekonomi dan politik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya Persekutuan Limae Ajatappareng yaitu permintaan barang dari luar Sulawesi Selatan tampaknya mengalami peningkatan pada abad ke-16 M. Limae Ajatappareng pada dasarnya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang sangat besar atau memiliki hubungan geneologi dan kekerabatan. Tidak mengherankan jika persekutuan Limae Ajatappareng terbentuk dengan cepat dan tanpa menghadapi banyak tantangan besar. Persekutuan Limae Ajatappareng menggunakan politik perkawinan sebagai mekanisme pertahanan untuk mempertahankan statusnya sebagai pusat perdagangan, khususnya terhadap tantangan dari kerajaan yang kuat.

Kata Kunci: Kekerabatan; Persekutuan Limae Ajatappareng; Politik

Pendahuluan

Pada tahun 1523 M. Lima kerajaan Ajatappareng membangun persekutuan yang disebut Limae Ajatappareng. Kelima kerajaan tersebut adalah Sawitto, Suppa, Sidenreng, Alitta dan Rappang yang semuanya terletak di bagian tengah Sulawesi Selatan. Sawitto terletak di ujung barat menghadap Selat Makassar. Sawitto juga terhubung dengan Sungai Saddang yang mengalir melalui Toraja, Enrekang dan Rappang. Suppa terletak di sebelah tenggara dan memiliki pelabuhan yang terletak di Soreang. Rappang terletak di timur bertetangga dengan Maiwa di utara dan Wajo di timur. Sidenreng juga terletak di timur dan timur laut. Sidenreng bertetangga dengan Soppeng di selatan dan Wajo di timur. Di Sidenreng juga terdapat Danau Sidenreng yang terhubung dengan Danau Tempe. Hingga akhir abad ke-18 M, para pedagang yang berlayar dari Teluk Bone dapat berlayar ke Danau Tempe jika ingin berdagang baik di Wajo maupun Sidenreng. Alitta terletak di tengah-tengah antara Sawitto dan Rappang. Alitta juga bertetangga dengan Suppa yang terletak di selatan.¹ Masyarakat yang tinggal di Persekutuan Ajatappareng adalah etnis Bugis yang pada umumnya berprofesi sebagai petani. Meskipun orang-orangnya pekerja keras tetapi mereka juga sombong, mudah marah dan suka berperang. Perang adalah salahsatu yang selalu digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Pada awal pembentukarnya, Limae Ajatappareng diarahkan dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Namun dalam perkembangannya, juga menyangkut pertahanan dan keamanan bersama.² Persekutuan ini menempatkan Kerajaan Suppa sebagai pusat perdagangan antara lain karena letaknya yang sangat strategis di pesisir pantai jazirah selatan Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Walaupun Kerajaan Sawitto berada di pesisir pantai yang sama, tetapi kurang cocok untuk dijadikan pelabuhan karena tidak mempunyai pulau sebagai penghalang dari terpaan ombak dan angin.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, kajian ini tidak hanya dapat memberikan petunjuk tentang dinamika kesejarahan kerajaan-kerajaan di wilayah Aiatappareng,

¹Stephen C Druce, *The Lands West of the Lakes: A History of the Ajatappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE*. (Leiden: KITLV, 2009).

²M. Amir, *KONFEDERASI AJATAPPARENG (Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-16)*. (Makassar: de la macca, 2013).

tetapi juga tentang hubungan antarkeraiaan yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan serta toleransi dan persaudaraan. Namun, jika disimak berbagai persoalan atau konflik sosial di sejumlah daerah yang terjadi akhir-akhir ini, maka muncul dalam pikiran bahwa kesalahan sejarah apa yang telah diperbuat sehingga bangsa kita yang dikenal sangat ramah dan toleransi berubah menjadi anarkis. Pada sisi lain muncul pemikiran bahwa kita telah melupakan sejarah sehingga kebersamaan, persatuan, dan kesatuan yang telah dibangun dalam kurun waktu yang lama itu telah memudar. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan penting dilakukan untuk mengungkapkan dinamika kesejarah dan hubungan antarkerajaan di daerah Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) historis deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan penelitian ini tidak semata-mata bersifat naratif, tetapi juga bermaksud menerangkan kejadian masa lampau secara analitis.

Metode Pendekatan yang digunakan yaitu; Pendekatan Historis yakni mennguji dan menganalisa rekaman, peninggalan serta peristiwa pada masa lampau, dengan cara mengadakan perbandingan sumber-sumber lontara' yang berkaitan erat dengan berdirinya, tujuan dan dampak Limae Ajatappareng. Melalui pendekatan historis seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan membumi. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat di alam idealis dengan yang ada di alam empiris. Dengan pendekatan ini seseorang dapat memahami tentang sejarah Limae Ajatappareng. Pendekatan Sosiologi dan Antropologi, Pendekatan sosiologi digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu dan di dalamnya akan terungkap golongan sosial yang berperan, pelapisan sosial, dan peranan serta status sosial. Pendekatan sosiologi digunakan dalam memahami kondisi kerajaan di Limae Ajatappareng. Pendekatan antropologi Seperti yang diketahui bahwasanya antropologi merupakan suatu cabang ilmu manusia dan kebudayaan. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha menjelaskan tentang perkembangan manusia yang mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan nilai kebudayaannya sehingga dengan pendekatan ini berupaya mendeskripsikan suatu kebudayaan atau tradisi masyarakat dan sistem

penyesuaian kepribadian. Pendekatan Ekonomi dan politik, pendekatan ini digunakan untuk memahami peristiwa yang terjadi dari segi ekonomi politiknya. Ekonomi merupakan cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Pendekatan ekonomi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekonomi dalam proses pembentukan dan pengembangan lima kerajaan dalam Persekutuan Ajatappareng. Sedangkan politik disini berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk menjaga ekistensi kerajaan-kerajaan yang berada di dalam persekutuan tersebut dan untuk melindungi diri dari kerajaan-kerajaan yang mengancam.

Sumber data yang digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian ini yaitu: Sumber data primer (primary sources) merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lalu. Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, atau catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal. Metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut; Heuristik kegiatan menghimpun jejak masa lampau, Kritik Sumber tentang masa lampau yang berhubungan dengan persekutuan Lima Ajatappareng yang diperoleh, Interpretasi dan Historiografi.

Terbentuknya Persekutuan Lima Ajatappareng

Keberadaan kerajaan Suppa di Sulawesi Selatan sebagai pemegang hegemoni perdagangan, dilatari oleh jalur perdagangan nusantara yang semakin ramai. Hal itu, berkaitan dengan terbukanya laut Cina sebagai jalur perdagangan utara-selatan, karena dikelilingi pulau-pulau.³ Terbukanya jalur perdagangan utara-selatan tersebut, sehingga dapat menghubungkan secara langsung antara Cina dengan Kepulauan Nusantara dan India pada awal abad XVI. Di sisi lain, yang membuat jalur perdagangan dan pelayaran semakin ramai yakni ditemukannya kompas sebagai suatu alat yang dapat digunakan sebagai penunjuk arah mata angin, sehingga pelayaran pesisir pantai sudah berani mengarungi lautan bebas.

³Muh. Ilham Majid Dohe, “INTEGRASI ISLAM TERHADAP MASYARAKAT KEDATUAN SUPPA,” *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya* 15, no. 1 (2024): 72-86.

Terbukanya jalur itu, sangat menguntungkan kedudukan persekutuan Limae Ajatappareng sebagai pemegang kunci pintu barat perdagangan di Sulawesi Selatan. Salah satu langkah antipatif keadaan pada waktu itu, yakni dengan cara mengajak kerajaan Sidenreng, Rappeng, Sawitto, Alitta untuk bersekutu. Persekutuan itu dilakukan untuk dapat mengantisipasi permintaan barang dagangan yang sangat laris di pasaran berupa: beras, kayu cendana, kulit penyu.⁴ Penghasil utama barang atau komoditi ekspor beras, dihasilkan oleh kerajaan Sindenreng, Rappeng, Alitta, Sawitto pada Waktu itu. Adapun kayu cendana, pada umumnya dihasilkan oleh ke lima kerajaan, sedangkan kulit penyu hanya di hasilkan oleh kerajaan Suppa dan Sawitto, karena berada di pesisir pantai.

Ajakan untuk mengadakan persekutuan, dilatarbelakangi oleh ikatan kekerabatan, di mana raja dan rakyat memiliki hubungan genealogis diantara lima kerajaan tersebut. Hal tersebut, sesuai prinsip orang Bugis yang menyatakan “*mau maja riaseng siajing na sempu lolo detu napettu perru lolona, nareko de siri’na pessenasi ritajeng, mau mingka decengna nareko tau laing, tau laeng memengngi*” artinya, walaupun bagaimana buruknya perangai keluarga, tidak akan mencelakakan, sebab kalau tidak mempunyai harga diri, rasa iba atau haru pasti ada. Sebaik-baiknya kelakuan dan kebaikan orang, kedudukan tetap sebagai orang ditengah kerabat. Selanjutnya, “*naiya ri asengnge sempulolo, pilami adecengeng, tenapitaiki ajaretta*”, artinya, kerabat atau keluarga pada hakekatnya selalu berniat pada kebaikan, dan tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat, kecuali terpaksa.

Di sisi lain, terbentuknya persekutuan didasarkan pada kepentingan dari masing-masing kerajaan dalam usaha mengembangkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinya. Pengembangan kesejahteraan sesuai prinsip utama Seorang raja atau pemimpin Bugis pada abad XVI M. yakni, “*nariasengnge pangulu ri kampongngge, messopi pakamponna. na messo, matinropi pakkamponna, na matinro, nareko malupui pangkampona, makapopangi pangulue*”. Artinya: yang dimaksud seorang pemimpin atau raja tidak akan makan-sebelum rakyat kenyang, tidak tidur sebelum rakyatnya tidur, lebih baik hidup menderita seumur hidup. Hal tersebut, merupakan-salah satu konsekuensi logis

⁴Susmihara and Muh. Hidayat Bakri, “Islamisasi Di Kedaduan Sawitto Pada Abad XVI-XVII,” *Tumanurung: Jurnal Sejarah dan Budaya* 1, no. 02 SE- (May 25, 2024), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tumanurung/article/view/47337>.

yang harus didipertanggungjawabkan dan diterima Seorang raja karena kedudukan sebagai pemimpin serta peranannya pengayom masyarakat.

Barangkali ada tiga faktor utama yang menyebabkan persekutuan Sawitto pada abad ke-16 dengan Suppa, Sidenreng, Rappang, dan Alitta. Pertama, sekitar tahun 1500 Sawitto telah muncul sebagai pemerintahan yang dominan di wilayahnya dan dengan demikian kurang peduli dengan kohesi internalnya. Kedua, Suppa mungkin telah memulai hubungan dengan Sawitto tak lama setelah kekalahan Sidenreng untuk mengkompensasi kemungkinan pengurangan produk yang dapat diekspor dari Sidenreng, terutama karena permintaan eksternal untuk barang-barang Sulawesi Selatan tampaknya meningkat pada abad ke XVI. Ketiga, selama abad ke XVI terjadi persaingan yang semakin ketat antara kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan untuk menguasai perdagangan, lahan pertanian, dan penduduknya, yang mungkin telah mendorong kelima kerajaan tersebut untuk lebih banyak bekerja sama.⁵ Selain itu, meningkatnya pengaruh kerajaan Gowa Makasar di sepanjang pantai barat semenanjung mungkin menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan aliansi antara Suppag dan Sawitto.

Terbentuknya persekutuan di Limae Ajalappareng abad XVI yaitu pada masa pemerintahan La Makkarawie Datu Suppa yang diperkirakan pada tahun 1523 Masehi. Pernyataan ini sesuai dengan data yang diperoleh dari lontara' yang menyatakan bahwa "seppulo dua taung rumpa' nna arajange ri lamalaka, na ripamullani assijangiange riasenge Limae Ajatappareng", artinya, dua belas tahun jatuhnya Malaka, di mulainya ikrar yang dinamakan Limae Ajatappareng. Adapun kerajaan-kerajaan yang mengadakan persekutuan tersebut, antara lain, kerajaan Suppa, Sidenreng, Sawitto, Alitta dan Rappeng. Masing-masing kerajaan yang bersekutu tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk tetap menjaga hubungan atau kerjasarna, terutama dalam aspek ekonomi, politik serta budaya sebagai Wujud kebersamaan. Di sisi lain, kerajaan yang bersekutu tidak diikuti oleh ambisi untuk saling menguasai antara satu dengan kerajaan lainnya.⁶

⁵Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Forum jakarta-paris, 2006).

⁶Darwas Rasyid, *Peristiwa Tahun-Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan Dari Abad XVI-XIX* (Ujung pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985).

Kerjasama dalam berbagai aspek tersebut, tidak ditunggangi oleh adanya keinginan untuk menguasai secara penuh atau sebagian salah satu Wilayah dari kerajaan dalam persekutuan Limae Ajattappareng atau menguasai persekutuan itu sendiri. Faktor-faktor inilah menjadi penyebab Adanya suatu ikatan solidaritas diantara kerajaan, bahkan diwujudkan dalam Sebuah ikrar bentuk nyata.

Masing-masing kerajaan yang berikrar diwakili raja La Pateddungi dari Addaowang Sidenreng, La Paleteyangi raja atau Datu Sawitto, La Makkarawie Datu Suppa, La Pakkolongngi Arung Rappeng dan juga sebagai Arung Alitta. Isi dari ikrar persekutuan Limae Ajattappareng Berdasarkan lontara, sebagai berikut:

*“Naiya Limae Ajattappareng silelang bola lima bili.’ Kegi-kegi napoji inanna iyanatu nauttamai, natimpa tange’na Limae nauttamai ana’na la timpa tange na Limae nassu ana’na, tenri sokkang ri teyana anae’ tenri lawa ri maelona, sijellokeng jori tana, tessitaro pakka seseyang maruma siliwekkang makkaja sipalalo, malilu sipakainge, siakkoling-kolingeng sipakainge rideceng paggakangna, rebba sipatokkong mali Siparappe, tesijelloreng roppo-roppo, tessi akellang-kellangeng limae masiyajing, tasiyenrekeng ri bulu tasinoreng ri lompo, deceng tauru ja ‘laduwai tessiyasengeng deceng rekko cedde ‘mi padecengngi, iyapa namadeceng napodcengngi idi limae, tapada poadai tapada bicarakki pada tutungi petau makkeda siyatepperengngi mappau tessipabelleang, malasai seddi, mabburai eppa, malasai dua mabburai tellu, malasa teluu mabburai dua, malasai eppa mabburai Siddi, tasitudangnge massiyajing lima tassapai unganna gangkanna talolongengngna deceng paggangkanna iya nasiturusina ikkeng Limae Ajattappareng naripadupa iya riajjancingengngi”.*⁷

Artinya: Kerajaan Limae Ajattappareng diibaratkan seperti rumah yang mempunyai lima kamar, di mana salah satu dari ke lima kamar yang disukai itulah yang dimasuki. Terbuka pintu untuk keluar masuk bagi anak-anaknya, dan tidak ada paksaan serta keinginan untuk menghalangi kemauannya. Masing-masing menentukan batas daerah, dan mempunyai kebebasan untuk mencari nafkah, Saling Inemperingati dalam kebajikan dan menegur yang salah.⁸ Bahkan tidak ada keinginan untuk -berhenti menyampaikan kebaikan. Bila jatuh harus saling menegakkan, jika hanyut harus saling tolong menolong. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan keburukan dari ke lima bersaudara Ke limanya harus secara bersama-sama mendaki ke gunung, dan menuruni lembah. Adapun kebaikan dan keburukan ditanggung bersama. Tidak dianggap baik jika hanya sebagian menikmatinya. Akan dikatakan baik, jika dinikmati secara bersama. Bila ada masalah, maka ke limanya harus membicarakan persoalan itu, dan masing-

⁷M. Amir, KONFEDERASI AJATAPPARENG (Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-16).

⁸M. Amir, KONFEDERASI AJATAPPARENG (Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-16).

masing harus hadir. Saling menentukan dan mentaati batas dalam berbicara, saling mempercayai dan tidak akan berdusta. Sakit satu empat yang mencari obat, sakit dua tiga, yang mencari obat sakit tiga dua mencari obat, empat sakit satu yang mencari obat. Kelima bersaudara bersatu dan berusaha untuk mencari kebajikan. Kesepakatan ini, merupakan ikrar dari Lima Ajattappareng yang harus dibuktikan sesuai isi ikrar dalam kehidupan kelak.

Berdasarkan isi ikrar itu, bahwa ke lima kerajaan mempunyai hak dan wewenang serta kebebasan mengembangkan kerajaannya. Kelima kerajaan Yang bersekutu tidak ada salah satu diantara mereka akan mentolerir atau dapat memegang hegemoni di persekutuan Ajatappareng.⁹ Dengan kata lain, bahwa masing-masing raja mempunyai kedaulatan atas wilayah kerajaannya, seperti sebelum terjadinya persekutuan tersebut. Bahkan rakyat dalam persekutuan mempunyai kebebasan untuk mencari nafkah di kerajaan lain, tanpa mendapat gangguan dan mempunyai kemerdekaan untuk menetap pada kerajaan dalam persekutuan tersebut tanpa meminta Izin terlebih dahulu.

Setiap kerajaan yang mengalami masalah atau musibah, terutama masalah berkaitan dengan orang banyak merupakan tanggung jawab Kerajaan lain untuk ikut serta memberi bantuan. Bantuan diberikan tidak mempunyai tendensi tertentu kepada kerajaan yang dibantu, hanya semata-mata terikat oleh ikrar dan tali kekerabatan. Hal tersebut, sesuai dengan konsepsi dasar ikrar yang berbunyi, “*rebba sipatokkong. Mali siparappe, malelu sipakainge*” artinya, setiap kerajaan yang masuk dalam persekutuan mempunyai kewajiban saling tolong-menolong, menegakkan keadilan dan bila mendapat kecelekaan harus saling menyelamatkan, jika lupa sesuatu harus diingatkan.

Status dan kedudukan dari ke lima kerajaan semuanya sama posisinya dalam menentukan kebijakan dalam persekutuan itu. Apabila didasarkan pada urutan kerajaan, maka raja Suppa, Sidenreng dianggap sebagai yang tertua dalam persekutuan itu. Sedangkan kerajaan lainnya, seperti kerajaan Rappeng, Alitta dan Sawitto dianggap sebagai saudara muda dalam persekutuan itu. Akan tetapi, segala keputusan yang akan diambil, biasanya ke lima kerajaan itu diundang dalam suatu rapat kerajaan untuk

⁹Mukhlis Paeni, *Membaca Manusia Bugis-Makassar* (Makassar: CV. Gisna Multi Mandiri, 2014).

menentukan kebijakan, terutama menyangkut masalah dihadapi, tindakan harus dilakukan untuk perkembangan dari persekutuan Limae Ajatappareng.¹⁰

Mengenai gelar raja berbeda di dalam persekutuan itu, misalnya: Datu Suppa, Datu Sawitto, Addawoang Sidenreng, Arung Rappeng dan Arung Alitta, merupakan hal yang lumrah di dalam pemakaian gelar kerajaan di Sulawesi Selatan. Gelar yang berbeda antara Addawoang dengan Arung, merupakan kebiasaan umum dalam masyarakat untuk menyebutkan raja atau pemimpin kerajaan, bukan sebagai kerajaan taklukan. Kenyataan tersebut, terlihat pada penamaan dan penggunaan nama gelar pada kerajaan besar seperti, Payung ri Luwu, Mangkau ri Bone, Sombaya ri Gowa dan Maradiya di Mandar.¹¹

Dengan demikian, bahwa kerajaan Suppa yang memakai gelar Datu pada rajanya, bukan sebagai penguasa tunggal atas kerajaan yang bersekutu dalam wilayah Limae Ajattappareng. Kerajaan Sidenreng memakai gelar Addaowang dan Alitta, Rappeng memakai gelar Arung. Bukanlah kerajaan palili atau kerajaan yang ditaklukan oleh kerajaan Suppa dan Sawitto melalui suatu ekspansi maupun peperangan. Akan tetapi, kerajaan Rappeng, Sidenreng dan Alitta adalah kerajaan yang berdaulat atas daerah kerajaannya dan tidak ada perjanjian yang mengharuskan membayar upeti kepada kerajaan lainnya.

Dalam ikrar tersebut, tidak ada keharusan untuk menutup diri terhadap berhubungan dengan kerajaan luar, terutama perdagangan, baik kerajaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, maupun kerajaan yang berada di luar Sulawesi. Dalam artian bahwa dalam persekutuan di Limae Ajatappareng untuk melakukan kegiatan niaga tidak mengenal adanya politik ekonomi proteksi serta monopoli perdagangan yang didominasi oleh kerajaan tertentu.

Walaupun kedudukan kerajaan Suppa sebagai pemegang pintu kunci perdagangan jalur barat tetap memberikan kebebasan kerajaan lain untuk mengadakan hubungan dagang dengan saudagar lain. Bahkan pedagang dari luar persekutuan Limae Ajatappareng bebas untuk mengadakan transaksi dengan perdagangan di Suppa, tanpa dihalangi. Sedangkan pedagang dalam persekutuan, juga mempunyai kebebasan

¹⁰Abd. Latif, *Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2014).

¹¹Darwas Rasyid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian* (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985).

berniaga atau berdagang keluar misalnya, ke Kalimantan, Jawa, Malaka dan Sumatera, Patani dan Pahang.¹²

Garis keturunan atau genealogi

Dalam pengembangan kerajaan yang masuk di dalam persekutuan Limae Ajatappareng, pada hakekatnya raja-raja yang ada di daerah ini adalah satu turunan, baik yang berada pada kerajaan besar maupun kerajaan kecil sebagai palili' atau kerajaan dikuasai. Adanya hubungan kekerabatan, bukan hanya terjadi diantara para raja dengan raja, akan tetapi juga dilakukan antara rakyat dengan rakyat yang masuk di dalam persekutuan tersebut.¹³ Tidak mengherankan jika masyarakat dan raja begitu mudah mengadakan suatu persekutuan tanpa didahului adanya perseteruan atau permusuhan diantara kelima kerajaan itu.

Menurut Iontara' Sidenreng, bahwa keturunan raja Sidenreng, Rappeng, Sawitto, Alitta, dan Suppa yakni "*seddimitu lorongeng na lima takkena*". Dalam artian, diibaratkan satu pohon penopang yang mempunyai tangkai kelima kerajaan sebagai tempat bertumpu. Hal tersebut dibuktikan perkawinan yang dilakukan oleh La Bungenge' dengan Manurunge ri Bulu' Paleteang atau Puang ri Sompae Datu Sawitto dan We Tepu Linge atau Manurunge ri Lawarangparang Datu Suppa. Penerimaan La Bangnge' sebagai suami dari kedua kerajaan Sawito dan Supa pada hakekatnya berkaitan dengan adanya keinginan, serta kecenderungan untuk tetap mempertahankan garis keturunan atau genealogi sebagai turunan bangsawan berdarah putih (arung matase) dalam istilah orang Bugis "*tau maddara takku*".¹⁴

Kecenderungan untuk dimadu dari ke dua kerajaan pada waktu bersamaan mempunyai kaitan erat dengan adanya keinginan masing-masing dari kerajaan mempertahankan garis keturunan sebagai to manurung. Tradisi mempertahankan garis keturunan bagi bangsawan Sulawesi Selatan sudah merupakan hukum adat yang tidak dapat dipungkiri secara umum. Menurut adat orang Bugis yang berlaku turun temurun sampai saat ini, mengawini saudara perempuan sekandung tidak diperbolehkan.

¹²Ahmad Yani, "Melacak Jejak Islamisasi Di Sidenreng Rappang Abad 17.," *Al Hikma* (2022): 124.

¹³Darwas Rasyid, *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian*.

¹⁴Hasaruddin, *Menyusuri Jejak Historis Kedatuan Sawitto Di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi Abad XVI-XVII* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

Namun larangan tersebut diperbolehkan bila kakaknya meninggal dunia bisa digantikan adik sekandung yang dalam istilah Bugisnya “*sisulle angkangulung*”.¹⁵

Hubungan kekerabatan diantara kerajaan yang masuk dalam lingkungan persekutuan Limae Ajatappareng dilanjutkan oleh Datu ke dua Suppa yang bernama La Tedunglompo yang mengawini kemanakannya sendiri bernama We Pattuling Arung Cempa dari Bacukiki anak dari saudaranya yang bernama We Tamanroli Datu ke dua kerajaan Sawitto. Hubungan kekerabatan dipererat lagi oleh raja ke lima dari Datu Suppa yang bernama La Makkarawie mengawini Arung Lowa sebagai Addawoang Sidenreng.

Perkawinan kerajaan Sidenreng dengan raja lain dalam persekutuan Limae Ajatappareng, di mulai oleh Addaowang ke dua bernama La Songkopulaweng mengawini We Pawawoi Arung Bacukiki sebagai lili’ atau kerajaan taklukan dari Datu Suppa. Bahkan Addaowang ke lima dari Sidenreng yang bernama La Pateddungi menjalin hubungan perkawinan dengan We Gimpo Datu ri Sompae sebagai Datu ke empat Sawitto.¹⁶

Hubungan kekerabatan dipererat oleh raja La Towudani yang menguasai dan bertahta pada lima kerajaan sekaligus di persekutuan Limae Ajatappareng yakni, Suppa, Alitta, Sidenreng, dan Rappeng, Sawitto. Kedudukan Towudani berdasarkan silsilah pada kerajaan Suppa merupakan Datu ke sembilan, di kerajaan Alitta sebagai Arung ke tujuh. Sedangkan pada kerajaan Rappeng sebagai Arung yang ke enam bertahta. Adapun kedudukan Tuwudani di kerajaan Sidenreng kedudukannya sebagai Addaowang yang ke sepuluh, dan kedudukan pada kerajaan Sawitto sebagai Datu yang ke tujuh. Bahkan di luar persekutuan Limae Ajatappareng, kedudukan Towudani adalah raja yang masih bertahta di kerajaan Citta (Soppeng) atau yang lebih dikenal sebagai Datunna Citta.

Berdasarkan uraian tersebut, pada hakekatnya kerajaan yang masuk dalam persukutuan Limae Ajatappareng adalah geanologi atau kerabat yang sangat besar yang dalam bahasa Bugisnya sering disebut “*tau siappang atau tau seddi lorongengenna*”. Tidak mengherankan, jika terbentuknya persekutuan Limae Ajatappareng dengan cepat

¹⁵Syahrir Kila, *Hubungan Kekerabatan Antara Kerajaan Suppa Dan Kerajaan Sawitto*. (Makassar: Balai Pelastarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2017).

¹⁶Edward L Poelinggomang, *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002).

dapat terealisasi, tanpa melalui hambatan yang berarti. Dalam artian bahwa, persekutuan itu terbentuk berdasarkan kepentingan dari masing-masing kerajaan tanpa dipaksakan, karena adanya ikatan kekerabatan atau genealogi. Dengan demikian, salah satu konsepsi yang paling ampuh dilakukan oleh raja dalam membina persekutuan dan untuk menghimpun kekuatan dibidang komoditi perdagangan adalah melalui jalur perkawinan yang dalam bahasa Bugisnya disebut “*cappa katauwwang*”.¹⁷

Perkawinan politik

Pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang Bugis tidak hanya di Nusantara, bahkan sampai ke Malaka dan kepulauan Madagaskar di Afrika Selatan. Pernyataan tersebut, diperkuat oleh pendapat para ahli sejarah yang menyatakan bahwa, semenjak abad XV, orang Bugis sangat terkenal sebagai pelaut ulung dan berani. Bahkan raja Malaka pada waktu itu menulis buku tentang kegiatan pelayaran di kepulauan-kepulauan Nusantara melalui keterangan lisan dari pedagang Bugis yang sedang berlabuh di Malaka.

Jiwa sebagai pelaut mempengaruhi watak, karakter, dan kepribadian dari orang Bugis yang bersifat aventurier, yakni, suatu jiwa yang berani mempertaruhkan hidupnya di rantau orang. Pertaruhan hidup itu, sesuai dengan teori politik perkembangan dan kemajuan orang Bugis yang berbunyi “kegi-kegi sore lopie konitu mallabu sengereng”, artinya di mana kita mencari nafkah, di situlah menjadi kampung halaman. Usaha di rantau untuk dapat mempertahankan hidup, orang Bugis pada umumnya mengadakan perkawinan dengan penduduk setempat untuk mendapatkan legitimasi sebagai anak negeri. Kecenderungan seperti itu, merupakan kebiasaan atau tradisi turun temurun, baik orang Bugis yang masuk dalam persekutuan Limae Ajatappareng, maupun di luar persekutuan.

Pengembangan wilayah kekuasaan setiap kerajaan persekutuan Limae Ajatappareng, sering menggunakan konsepsi yakni, “*tellu cappa yainaritu: cappa lila, cappa gajang, cappa katauwwang*”, artinya, tiga ujung yakni, Ujung lidah, ujung badik, dan ujung kemaluan.¹⁸ Pengertian *cappa lila* yakni pengembangan kerajaan dengan

¹⁷dkk. Edward L. Poelinggomang, *Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Di Sulawesi Selatan*. (Makassar: : Laporan Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2004).

¹⁸Rimba Alam A. Pangerang., *Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2009).

menggunakan cara atau menggunakan teknik berdiplomasi kepada raja yang ingin ditaklukan. Teknik diplomasi telah dipraktekkan oleh La Paggala pada waktu menghadapi serangan kerajaan Bone terhadap Sidenreng, hanya dengan menggunakan pembicaraan atau "*lecco-lecco adami*", maka serangan tersebut diurungkan tanpa menggunakan kekuatan phisik, dan tidak meminta sesuatu sebagai imbalan atau pampasan perang.

Dalam pengembangan kerajaan yang masuk dalam persekutuan, teknik kedua berupa cappa gajang tidak pernah digunakan untuk memperluas wilayahnya. Bahkan beberapa lili' atau vassal masuk pada kerajaan tertentu, karena diikat oleh tali perkawinan atau cappa katauwwang sebagai alat paling ampuh digunakan untuk mengembangkan daerah kekuasaannya. Di antara kelima kerajaan yang masuk ke dalam persekutuan Limae Ajatappareng, ada tiga kerajaan yang mempunyai wilayah yang sangat luas. Luasnya wilayah kekuasaan kerajaan tersebut, Dilatari oleh banyaknya kerajaan lili' atau kerajaan taklukan yang dimiliki. Seperti halnya, kerajaan Sidenreng mempunyai lili' Amparita, Carawali, , Bilokka, Wanio, Wette, Otting, Bila, Bulu Cenrana dan Barukku. Kerajaan Sawitto mempunyai lili' kerajaan Batulappa, Letta, Kassa, Talabangi, Padangkalawa dan Tiroang. Sedangkan kerajaan Suppa, juga mempunyai lili' yakni kerajaan Bacukiki, Nepo, Palanro dan Bojo.¹⁹

Setiap lili' atau kerajaan yang ditaklukkan diangkat seorang Arung dikalangan sendiri (dari kerajaan ditaklukkan) untuk memerintah wilayahnya dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada kerajaan yang menguasainya. Wujud kepatuhan dari suatu kerajaan lili' diharuskan memberikan upeti setiap tahun, terutama hasil pertanian yang

Perkembangan persekutuan kerajaan Limae Ajatappareng tidak lepas dari peranan seorang cendekiawan yang bernama La Paggala Nene' Mallomo dan dikenal sebagai To Maccana Sidenreng. Kemasyhuran tidak hanya di kalangan kerajaan yang bernaung di dalam persekutuan Limae Ajatappareng, bahkan termasyhur sampai kerajaan luar. Nene' Mallomo juga berperan sebagai penasehat utama di kerajaan Sidenreng dan dikenal salah seorang cendekiawan Bugis yang hidup dua jaman. Salah satu konsepsi yang dipedomani oleh 'kerajaan dalam persekutuan pada waktu itu,

¹⁹E. L. Poelinggomang, *Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam: Kontinuitas Dan Perubahan* (Yogyakarta: Ombak, 2004).

yakni, “naiyya riaseng urane iyanaritu tau mullei mpuno bata-bata, nade’ narangasela moloji riasengge perri” artinya, yang dinamakan laki-laki dalam kehidupan ini, adalah orang mampu menghadapi setiap persoalan tanpa ragu dan mengeluh.

Kepintaran dan cara berfikirnya setaraf dengan La Meggu To Maccana dari kerajaan Luwu, La Meliong Kajaolaliddong To Maccana dari kerajaan Bone serta La Tadampare Puang ri Maggalatung To Maccana dari kerajaan Wajo. Petuah-petuah Nene’ Mallomo meliputi berbagai bidang meliputi, bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Petuah juga, berisi tentang bagaimana seharusnya seorang penguasa atau raja bertindak dan bentuk pelaksanaan hukum dalam kerajaan. Kedudukan Nene’ Mallomo berdasarkan lontara’ dianggap sebagai motivator Limae Ajatappareng untuk menjadikan salah satu kerajaan makmur di Sulawesi Selatan pada waktu itu.

Di samping itu, perkembangan kerajaan Limae Ajatappareng dilatari oleh jatuhnya Malaka pada tahun 1511 M. ke dalam kekuasaan Portugis dan membawa pengaruh paling mendasar terhadap pelayaran dan di Nusantara. Saudagar-saudagar Islam menghindari selat Malaka dan beralih ke arah pantai barat Sumatera, sehingga selat Sunda menjadi ramai dan sepanjang pantai utara pulau Jawa. Hal tersebut, menyebabkan Banten dan Cirebon, Demak menjadi pusat perniagaan pada tahun 1527 Masehi.²⁰ Para pedagang luar yang mencari rempah-rempah, beras dan kayu cendana, sudah tersedia pada pusat perniagaan tersebut. Sedangkan pengumpulan komoditi itu, dilakukan oleh pedagang Jawa dan Melayu di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Dengan demikian, kedudukan Suppa dan Siang sebagai pusat pengumpul barang komoditi perdagangan yang laku di pasaran dunia. Maka tidak mengherankan jika pada pertengahan abad XVI kerajaan Suppa sebagai pusat kegiatan perdagangan dari persekutuan Limae Ajatappareng di Sulawesi Selatan mulai berkembang sebagai bandar niaga yang ramai dikunjungi oleh saudagar Islam.

Saudagar-saudagar Islam dari Sumatera, Jawa dalam perjalannya menuju Maluku singgah di pantai Sulawesi Selatan untuk membeli bahan makanan. Di samping itu, para saudagar membeli komoditi perdagangan berupa beras, karena merupakan bahan pokok yang paling laku dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat

²⁰Abd. Rahman Hamid, *Sejarah Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2013).

Maluku dan kepulauan lain disekitarnya.²¹ Adapun kerajaan-kerajaan penghasil beras seperti, persekutuan Limae Ajatappareng dan kerajaan Siang, sehingga menjadi salah satu bandar perniagaan di Sulawesi Selatan yang sangat ramai dikunjungi oleh pedagang nusantara.

Untuk mempertahankan kedudukan sebagai pusat perniagaan, maka politik perkawinan digunakan oleh persekutuan Limae Ajatappareng Sebagai alat untuk mempertahankan diri, terutama dari ancaman kerajaan besar seperti kerajaan Bone, Gowa, Wajo, Soppeng dan kerajaan Luwu. Politik perkawinan Adddaowang Sidenreng yang ke empat bernama La Pasampoi, kawin dengan We Tappatana Daeng Rilangi anak Datu Mario Riawo. Begitu pula politik mempertahankan diri yang dilakukan oleh Setiap kerajaan dalam persekutuan misalnya, Datu Suppa ke tiga yang bernama La Boting Langi kawin dengan Datu Mario Riawo dari Soppeng. Kemudian dilanjutkan oleh Datu Suppa yang ke enam bernama La Patiroi mengawini anak dari i Monri Gau Daeng Bonto To Nipalangga Ulaweng sebagai raja Gowa yang ke sepuluh. Sedangkan Datu Sawitto ke tiga bernama La Paleteange, juga melakukan perkawinan dengan orang luar yakni anak raja Bone yang tidak diketahui namanya melahirkan La Cellamata sebagai Datu ke empat.²²

Dari keterangan tersebut, bahwa politik perkawinan tidak dapat mengantisipasi keadaan selanjutnya, di mana pada pertengahan abad XVI terjadi perubahan secara mendasar. Hal tersebut, berkaitan dengan terdesaknya kerajaan Luwu dalam perdagangan, terutama perdagangan biji besi dengan kerajaan Majapahit yang mengalami keruntuhan dalam bahasa Jawanya disebut "*pralaya*" yakni pada ahir abad XV atau tahun 1478 berdasarkan naskah Negara Kertagama.²³

Di samping itu, munculnya dua kekuatan baru yang saling bersaing Satu sama lain untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan dan kedaulatan terhadap kerajaan kecil, baik di pesisir barat dan timur yakni: kerajaan Bone dan Gowa. Persaingan itu, berkaitan erat dengan keinginan masing-masing kerajaan tersebut menguasai pusat-pusat

²¹Anonim, *Lontara' Addituang Sidenreng*, n.d.

²²Christian Pelras, *Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan Kesaksian Bangsa Asing* (Jakarta, 1983).

²³Edward L Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Jakarta: Gramedia, 2007).

perniagaan dan pelayaran di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Suppa sebagai pemegang kunci pintu perdagangan pesisir barat.

Kesimpulan

Dampak akibat terbukanya laut Cina sebagai jalur perdagangan Utara-Selatan sangat menguntungkan kedudukan kerajaan Suppa sebagai pemegang hegemoni perdagangan. Salah satu langkah antipatif keadaan pada waktu itu, yakni dengan cara mengajak kerajaan Sidenreng, Rappeng, Sawitto, Alitta untuk bersekutu. Persekutuan itu dilakukan untuk dapat mengantisipasi permintaan barang dagangan yang sangat laris di pasaran berupa: beras, kayu cendana, kulit penyau.

Ajakan untuk mengadakan Persekutuan juga di akibatkan karena adanya ikatan kekerabatan dimana raja dan rakyat memiliki hubungan geneologis di antara lima kerajaan tersebut. Selain itu adanya kerja sama politik yang dilakukan oleh para raja di lima kerajaan tersebut melalui perkawinan politik dalam rangka mempertahankan persekutuan. Kejayaan persekutuan tersebut didukung oleh kondisi politik di Sulawesi Selatan pada awal abad XVI M. Selain itu juga, persekutuan ini telah menjalin hubungan dengan pedagang dari luar dan pedagang dari Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- Abd. Latif. *Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Abd. Rahman Hamid. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Ahmad Yani. "Melacak Jejak Islamisasi Di Sidenreng Rappang Abad 17." *Al Hikma* (2022): 124.
- Anonim. *Lontara' Addituang Sidenreng*, n.d.
- Christian Pelras. *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum jakarta-paris, 2006.
- . *Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan Kesaksian Bangsa Asing*. Jakarta, 1983.
- Darwas Rasyid. *Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian*. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985.
- E. L. Poelinggomang. *Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam: Kontinuitas Dan Perubahan*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Edward L. Poelinggomang, dkk. *Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Di Sulawesi Selatan*. Makassar: : Laporan Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2004.

- Edward L Poelinggomang. *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- . *Makassar Abad XIX, Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Hasaruddin. *Menyusuri Jejak Historis Kedatuan Sawitto Di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi Abad XVI- XVII*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- M. Amir. *KONFEDERASI AJATAPPARENG (Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-16)*. Makassar: de la macca, 2013.
- Muh. Ilham Majid Dohe. "INTEGRASI ISLAM TERHADAP MASYARAKAT KEDATUAN SUPPA." *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya* 15, no. 1 (2024): 72-86.
- Mukhlis Paeni. *Membaca Manusia Bugis-Makassar*. Makassar: CV. Gisna Multi Mandiri, 2014.
- Rasyid, Darwas. *Peristiwa Tahun-Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan Dari Abad XVI- XIX*. Ujung pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1985.
- Rimba Alam A. Pangerang. *Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2009.
- Stephen C Druce. *The Lands West of the Lakes: A History of the Ajatappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200 to 1600 CE*. Leiden: KITLV, 2009.
- Susmihara, and Muh. Hidayat Bakri. "Islamisasi Di Kedatuan Sawitto Pada Abad XVI- XVII." *Tumanurung: Jurnal Sejarah dan Budaya* 1, no. 02 SE- (May 25, 2024). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tumanurung/article/view/47337>.
- Syahrir Kila. *Hubungan Kekerabatan Antara Kerajaan Suppa Dan Kerajaan Sawitto*. Makassar: Balai Pelastarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2017.